



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 BIRO HUKUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mahfudiyah**

Jabatan : Kepala Biro Hukum

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Rudy Heriyanto Adi Nugroho**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Sekretaris Jenderal

PIHAK PERTAMA
Kepala Biro Hukum



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rudy Heriyanto Adi Nugroho



Ditandatangani
Secara Elektronik

Mahfudiyah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BIRO HUKUM

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP	1	Indeks Reformasi Hukum KKP (indeks)	87
		2	Indeks Kualitas Kebijakan KKP (indeks)	85
		3	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%)	100
		4	Persentase Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani (%)	100
		5	Persentase Permasalahan Hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani (%)	100
		6	Persentase Perjanjian Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Siap untuk Ditandatangani (%)	100
		7	Persentase Instrumen Hukum Internasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Diberikan Pertimbangan Hukum (%)	100
		8	Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Kelautan dan Perikanan (nilai)	92,5
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum	9	Nilai PM SAKIP Biro Hukum (nilai)	87,2
		10	Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum (indeks)	82,5
		11	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Biro Hukum (%)	100
		12	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hukum (%)	95
		13	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Hukum (%)	86
		14	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP (%)	100
		15	Persentase Pelaksanaan Rencana Kerja Zona Integritas Lingkup Biro Hukum (%)	80

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Legislasi, Litigasi dan Kerja Sama	8.500.000.000
2.	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	5.717.341.000
Total Anggaran Biro Hukum Tahun 2026		14.217.341.000

Jakarta, 26 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Sekretaris Jenderal

PIHAK PERTAMA
Kepala Biro Hukum



**Ditandatangani
Secara Elektronik**



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Mahfudiyah